

Determinants Of Use Of Quick Response Indonesian Standard (QRIS) As A Payment System For Msmes In DKI Jakarta

By Ananda Maehira

Abstract

This research is a quantitative research that aims to determine the influence of benefit perception, risk perception and tariff policy on QRIS usage decisions. This research uses MSME actors in DKI Jakarta as a sample. Data collection was carried out by distributing questionnaires with a sample number of 100 respondents. Hypothesis testing in this study using Multiple Linear Regression Analysis, T Test and Coefficient of Determination Test with SmartPLS program. The results of the test found that (1) there was a significant positive influence of benefit perception on the decision to use QRIS, (2) there was a significant positive influence of risk perception on QRIS use and (3) there was a significant positive influence of tariff policy on QRIS use for MSMEs in DKI Jakarta.

Keywords : *benefit perception, risk perception, tariff policy, MSMEs, DKI Jakarta.*

**Determinan Penggunaan *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)*
Sebagai Sistem Pembayaran Pada UMKM Di DKI Jakarta**

Oleh : Ananda Maehira

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat, persepsi risiko dan kebijakan tarif terhadap keputusan penggunaan QRIS. Penelitian ini menggunakan pelaku UMKM di DKI Jakarta sebagai sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dengan jumlah sampel yang didapat sebesar 100 responden. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda, Uji T dan Uji Koefisien Determinasi dengan program SmartPLS. Hasil dari pengujian diperoleh bahwa (1) terdapat pengaruh positif signifikan persepsi manfaat terhadap keputusan penggunaan QRIS, (2) terdapat pengaruh positif signifikan persepsi risiko terhadap penggunaan QRIS dan (3) terdapat pengaruh positif signifikan kebijakan tarif terhadap penggunaan QRIS bagi UMKM di DKI Jakarta.

Kata kunci : persepsi manfaat, persepsi risiko, kebijakan tarif, UMKM, DKI Jakarta.